BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghidari terjadinya kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, maka akan diberikan penegasan terhadap istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat Desa Cidatar

Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata daya (*power*). Menurut American Heritage Dictionary adalah "*to give Authority or legal power to*" yang bisa diterjemahkan sebagai memberi kuasa.[1]

Sedangkan pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu upaya untuk membantu dan mendampingi masyarakat desa Cidatar dalam rangka menumbuhkembangkan potensi yang dimiliki untuk menuju kemandirian atau ke-Swadayaan masyarakat, baik secara person atau pun kolektif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Masyarakat desa Cidatar adalah kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah pemerintahan dibawah pimpinan Camat,[2] dan berada dalam wilayah pemerintahan kabupaten Garut Jawa Barat. Adapun

---

[1] Vidhyandika Moeljarto, "*Pemberdayaan Masyarakat Melalui IDT*", dalam Onny S. Prijini dan AMW. Pranakan (penyunting), *Pemberdayaan Konsep,Kebijakan dan Implementasi* Jakarta, Center For Strategik and International Studies, 2000, hlm 133

[2] Fahmi Justiwi, *Desa dan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa,* dalam Darmansyah (ed), Kumpulan Esai Ilmu Sosial Dasar, Surabaya, Usaha Nasional, 1986, hlm 212

masyarakat yang mejadi objek dalam penelitian ini adalah masyarakat jamaah mesjid At-taqwa, dan jamaah-jamaah mesjid di bawahnya yang berada dibawah binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Islam, dan memfokuskan pemberdayaannya pada aspek ekonomi dan pendidikan.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Islam (LePMI)

Merupakan sebuah organisasi swadaya masyarakat yang memfokuskan gerakannya pada pemberdayaan masyarakat desa Cidatar terutama yang menyangkut bidang ekonomi, pendidikan dan bidang keagamaan.

Lembaga ini didirikan oleh sebagian masyarakat desa Cidatar sebagai sarana untuk menyalurkan gagasan dan ide untuk memajukan lembaga-lembaga pendidikan, seperti masjid dan madrasah, juga meningkatkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Penyebutan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Islam dalam skripsi ini selanjutnya akan di singkat dengan LePMI.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jadi yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat desa Cidatar oleh LePMI di sini adalah sebuah upaya yang dilakukan LePMI dalam rangka membantu menumbuh kembangkan potensi dan sumber daya masyarakat desa Cidatar terutama dalam aspek pendidikan dan ekonomi.

B. Latar Belakang Masalah

Desa dalam pandangan lama selalu digambarkan sebagai suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat tradisional yang hidup rukun dan terbelakang. Model masyarakat desa tradisional diartikan sebagai komunitas tertutup, berorientasi kedalam (*inward oriented*), swasembada (*self sufficient*), dan bersolidaritas komunal.

Sebagai bagian dari sebuah Negara, desa secara langsung menjadi bagian dari proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Di Indonesia sendiri agenda pembangunan desa sudah menjadi wacana dan bagian dari kebijakan-kebijakan pemerintah, yang tertuang dalam Repelita (dalam masa Orde Baru) dan GBHN.

Menurut Sayogyo, sejak tahun 1904 terjadi penurunan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat terutama di wilayah Jawa, karenanya baik pada masa Orde Lama sampai ke masa Orde Baru, desa cukup mendapat perhatian mengingat hampir 90 persen desa-desa di Indonesia berada dalam garis kemiskinan. Studi tersebut terjadi hampir di seluruh wilayah Jawa dan Madura, yang meliputi; penguasaan tanah, usaha tani, irigasi, industri desa dan perdagangan.[3]

Selama dua dasawarsa terakhir setelah Orde Lama, pembangunan desa di Indonesia secara umum lebih bersifat *Top-down* dan padat modal yang

[3] Sayogyo, *Pemikiran tentang kemiskinan Di Indonesia Dari Masa Penjajahan sampai Pembangunan*, PRISMA edisi No 3/Tahun XII/1993, hlm 1

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dibiayai oleh pendapatan modal asing. Pembangunan seperti ini sulit mengatasi kemiskinan sebagian besar masyarakat desa dan menimbulkan kesenjangan sosial, dikarenakan kebijakan-kebijakan pembangunan yang cenderung terpusat, dan dilaksanakan oleh birokrasi yang merupakan tangan kanan pemerintah, seperti LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) yang kemudian menjadi pelopor program-program pembangunan pemerintah di tingkat desa. Akibatnya terjadi kesenjangan antara kebutuhan mengembangkan keberdayaan masyarakat desa dan kecenderungan pemerintah untuk mempertahankan kontrol terhadap masyarakat.

Kombinasi di antara peningkatan aspirasi dengan kelemahan pembangunan tersebut, mendasari lahirnya kehendak dan tuntutan masyarakat untuk berpartisipasi aktif di dalam pembangunan dan politik.

Gelombang desentralisasi dan demokratisasi yang mulai bergerak pada skala nasional dewasa ini telah membawa peluang baru perkembangan desa. Sebut saja dalam kaitannya dengan pemerintahan desa, UU No.22/1999 telah memberikan peluang bagi terbentuknya lembaga perwakilan di tingkat pedesaan (BPD), dan tidak lagi menempatkan desa dalam hierarki langsung pemerintah nasional. Lingkup dan batasan pemerintahan desa juga bisa dirumuskan kembali agar lebih sesuai dengan tradisi dan istiadat lokal. Hal ini semakin dipertegas dengan keputusan mentri dalam negri no 42 tahun 1969, yang menetapkan pola dasar dan gerak operasional pembangunan desa yakni; pembangunan masyarakat desa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang harus didasarkan pada swadaya masyarakat itu sendiri. Dan harus menumbuhkan swadaya dari masyarakat melalui demokrasi desa.[4]

Hal ini dimaksudkan agar pembangunan desa benar-benar dilaksanakan, terutama atas inisiatif, kemauan, dan kekuatan serta usaha sendiri, agar mampu mengenali dan menggali berbagai potensi daya yang dimiliki, sehingga dengan kesadaran dan kemampuan demikian masyarakat tidak lagi tergantung kepada pihak lain.

Persoalan pemberdayaan ini semakin dikenal seiring dengan menjamurnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia sekitar awal tahun 1970-an yang dimotori oleh orang-orang yang memiliki keprihatinan sosial, dan ingin melakukan pemberdayaan untuk masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Keberadaan LSM adalah untuk mengawasi jalannya pembangunan dan untuk menghindari kelalaian elit memperjuangkan dan memenuhi hak masyarakat di dalam pembangunan yang cenderung terabaikan oleh sistem politik yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kelahiran Lembaga ini berkaitan dengan kebutuhan, kehendak dan tuntutan untuk berpartisipasi masyarakat sebagai bentuk kekuatan yang berpontensi bagi mendukung kemandiriannya. Selain itu Lembaga Swadaya Masyarakat adalah gerakan untuk kesejahteraan dan kemandirian

---

[4]Sayogyo, *Dari "punya daya" Menjurus ke Partisipasi yang Saling Memberdayakan*, makalah Pemaparan Pembuka, Forum V (FPPM) di Bukittinggi, tanggal 3-6 Juni 2002, hlm 1

masyarakat yang digalang sebagai reaksi terhadap ketimpangan sosial-ekonomi-politik yang dirasakan masyarakat luas di awal masa-masa pembangunan (tahun 1970-an). [5]

Selain bertujuan untuk memonitor kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan, LSM juga bertujuan untuk mengembangkan pembangunan dengan partisipasi masyarakat yang biasanya dilakukan melalui penciptaan dan dukungan terhadap kelompok-kelompok swadaya lokal yang berasal dari masyarakat sebagai usaha untuk menumbuhkan sikap partisipasi sebagai komponen penting dalam membangkitkan kemandirian dan proses pemberdayaan.

Sekitar tahun 1990-an, lembaga swadaya masyarakat ini semakin menyebar memasuki desa-desa yang dianggap punya potensi besar untuk andil secara terbuka dalam pembangunan masyarakat.

Salah satunya adalah lembaga Pemberdayaan Masyarakat Islam (LePMI). Lembaga ini didirikan oleh sebagian masyarakat desa Cidatar yang ingin melakukan pendampingan-pendampingan khususnya dalam masalah-masalah keagamaan, ekonomi umat Islam dan pendidikan Islam di desa Cidatar.

LePMI didirikan dengan cita-cita dan harapan besar. Keberadaan lembaga ini dimotori oleh beberapa pemuda yang saat itu melihat sangat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[5] Arbi Sanit *"Mewadahi Partisipasi Politik Masyarakat"* makalah dalam forum CIDES, Jakarta, 1996, hlm 3

kurangnya kesadaran masyarakat terhadap masalah pendidikan, padahal didesa Cidatar banyak lembaga-lembaga pendidikan yang berdiri dengan biaya yang sangat murah.

Maka atas keinginan untuk memajukan lembaga dan meningkatkan kualitas pendidikan tersebut, para pemuda ini membicarakan sebuah lembaga yang kelak diharapkan akan mempunyai kontribusi besar dalam upaya mencerdaskan dan meningkatkan mutu sumberdaya masyarakat desa Cidatar.

Organisasi ini berdiri pada tahun 2001 dan memfokuskan kegiatannya pada masalah-masalah ekonomi masyarakat dan pendidikan. Lahirnya lembaga ini dilatar belakangi oleh kepedulian terhadap lembaga-lembaga sosial keagamaan seperti masjid dan madrasah di desa Cidatar, dalam hal meningkatkan sumberdaya manusia, disamping menumbuh kembangkan sikap partsipasi masyarakat dalam kebijakan-kebijkan publik baik yang diselenggarakan pemerintah desa ataupun lembaga-lembaga sosial masyarakat seperti masjid dan madrasah, dan keinginan untuk mengaktifkan kegiatan keagaman dengan menjadikan semangat agama Islam sebagai dasar bagi kehidupan warga masyarakat desa Cidatar.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam gerakannya di masyarakat, LePMI mencoba menerapkan sistem pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pemberdayaan

terutama dalam masalah ekonomi umat dan pendidikan Islam juga masalah-masalah keagamaan yang melibatkan masyarakat secara aktif-partisipatif.[6]

Berangkat dari latar belakang inilah, penulis mencoba mengangkat LePMI untuk dikaji secara lebih lanjut, dengan beberapa alasan : *pertama:* LePMI adalah salah satu lembaga swadaya yang melakukan proses pemberdayaan masyarakat, yang menjadi tema sentral kajian ini. *Kedua:* LePMI telah menjadi lembaga pertama di desa Cidatar yang berdiri atas inisiatif dan dukungan masyarakat Cidatar.

Sebagai Lembaga pemberdayaan masyarakat, penelitian ini akan melihat bagaimana pemberdayaan yang dilakukan LePMI pada masyarakat desa Cidatar sejak tahun 2001-2003.

C. Rumusan masalah

1) Bagaimana kondisi pendidikan dan ekonomi di desa Cidatar?

2) Bagaimana proses pemberdayaan yang dilakukan LePMI?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Tujuan penelitian

1) Ingin mengetahui kondisi pendidikan dan ekonomi masyarakat desa Cidatar

2) Ingin mengetahui proses pemberdayaan yang dilakukan LePMI di desa Cidatar.

---

[6] Profil Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Islam (LePMI), edisi-1 tahun 2002, hlm 2

E. Kegunaan penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Penelitian tentang pemberdayaan masyarakat di Indonesia bukanlah hal yang baru. Akan tetapi penulis berharap penelitian ini akan menambah wacana dan karya ilmiah tentang kasus-kasus pemberdayaan dan pengembangan masyarakat serta menjadi acuan untuk membangun teori-teori pengembangan masyarakat di masa akan datang.

b) Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi gambaran bagi mahasiswa yang ingin melakukan kerja-kerja kemasyarakatan serta menjadi data awal yang kemudian bisa melahirkan strategi pemberdayaan masyarakat yang lebih tepat lagi.

F. Landasan Teori

1) Desa dan Masyarakat desa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Desa merupakan perangkat terendah dari sebuah sistem birokrasi yang sentralistis, herarkis-vertikal, yang pusatnya berada di luar wilayah budayanya sendiri. Dalam dirinya dia tidak memiliki perangkat-perangkat yang otonom dalam konteks hubungan strukturalnya dengan pemerintah pusat, dan sama sekali bukanlah miniatur dari sebuah "negara." Dia adalah bagian yang terkecil, dan sekaligus ujung tombak, dari suatu sistem pemerintahan yang selama ini dikendalikan dari atas, yang beruntun secara

struktural-vertikal sampai ke pusat yang orientasinya adalah pada "kepatuhan" dan "keseragaman," bukan pada "kemandirian" dan "keragaman."[7]

Dalam undang-undang no 5/1979 yang dimaksud desa adalah wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai pemerintahan terendah langsung dibawah camat yang berhak menyelenggarakan rumahtangganya sendiri dalam ikatan negara republik Indonesia.[8]

Sedangkan secara sosiologis desa merupakan bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan di mana mereka saling berinteraksi baik dan pemahaman yang relatif homogen serta banyak menggantungkan diri pada alam.

Desa merupakan unit administrasi terkecil dari sebuah sistem pengaturan pemerintah dan memposisikan diri sebagai rantai struktur terakhir dari suatu jaringan sistem birokrasi pemerintah pusat yang memiliki keunikan-keunikan bentuk otoritas tersendiri dan kerap kali berbeda dengan pemerintahan pusat dalam menyelenggarakan pengaturan dan pemerintahannya. Bentuk-bentuk itu sering terimplementasikan dalam bentuk karakter kolektif masyarakatnya seperti sifat (sikap) gotong royong,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[7] Mochtar Naim, *Nagari Versus Desa : Sebuah Kerancuan Struktural*, makalah, di sampaikan pada Seminar Sehari Pekan Budaya dan Pameran Pembangunan Sumatra Barat, di Payakumbuh, 25 Desember 1989, hlm 3

[8] Taziliduhu ndharaha, D*imensi-dimensi Pemerintahan Desa,* Jakarta, Bumi Aksara, 1991, hlm 4

musyawarah, dan solidaritas sosial lainnya.[9] Sehingga sikap swadaya (kemandirian yang muncul dari diri sendiri) kerapkali justru muncul dari desa.

Masyarakat desa adalah masyarakat yang diperintah (*orderd society*) dalam sekup yang kecil dan relatif otonom yang bernama desa. Dimana formasi sosialnya tersusun dari satuan (unit) keluarga yang menyerap satuan individu ke dalam pengaturan dan pengurusannya masing-masing. Sehingga satu sama lain, keterlibatan unit-unit keluarga sebagai pranata sosial dengan institusi (pemerintahan) desa, bisa menghasilkan norma dan sistem nilai, yang bisa saja, tidak sama dengan kasus desa lainnya.

Seperti salah satu tipe masyarakat desa yang berbasisikan tradisi agrikultur yang digambarkan oleh Koentjaraningrat. Masyarakat desa menurutnya adalah masyarakat yang hidup bercocok tanam padi di sawah, dengan struktur sosial yang agak kompleks, serta memiliki jaringan sosial ke perkotaan.[10] Definisi ini akan berbeda jika dimisalkan dengan masyarakat desa nelayan yang mempunyai kasus berbeda.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pada umumnya, masyarakat pedesaan di Jawa memiliki bentuk dan struktur sendiri-sendiri. Menurut Sartono secara ekonomi substensi msyarakat desa telah mengadakan lembaga-lembaga yang mandiri, yang struktur kelembagaannya tersesuaikan kepada cara produksi (*mode of*

---

[9] Sayogyo (penyunting), *Sosiologi Pedesaan,Kkumpulan Bacaan Jilid ke-Dua,* Yogyakarta, Gajah mada Press, 1995, hlm 6

[10] Koentjaraningrat, *Pokok-pokok Antropologi Sosial,* Jakarta, Dian Rakyat, hlm 173

production) agraris tradisional. [11] Sedangkan dalam kajiannya Roucek & Warren karakteristik yang paling menonjol dari masyarakat desa adalah a) memiliki sifat yang homogen dalam hal kebudayaan, tingkah laku dan mata pencaharian. b) menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi. c) dipengaruhi letak geografis. d) mempunyai hubungan sosial yang intim.[12]

2) Desa dan Perubahan Sosial

Istilah perubahan sosial (*social change)* memiliki makna yang problematik. Perubahan sosial bisa meliputi perubahan sikap, prilaku, pola hubungan antara dua orang atau lebih, seperi pola hubungan kekerabatan, suami istri atau pola hubungan antar keluarga dalam komunitas tertentu. Akan tetapi dalam kenyataan praktisnya, konsep peruhahan sosial selalu mengacu untuk perubahan yang jauh lebih besar dari sekedar pola interaksi antar individu atau lebih, seperti perubahan sistem politik dari monarkhi absolut ke demokrasi parlementarian, perubahan sistem ekonomi; dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, perubahan rasionalitas; dari theosentris ke antroposentris. Perubahan besar di atas sering disederhanakan menjadi transformasi sistem masyarakat tradisional ke masyarakat moderen. Dengan kata lain perubahan sosial secara *taken for granted* artinya mengacu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Sartono Kartodirdjo, *Lembaga Swadaya Masyarakat,Ssebuah Tinjauan Singkat,* PRISMA edisi no 1 tahun XVII 1988 hlm 98

[12] Jepta Leibo, *Sosiologi Pedesaan Mencari Suatu Stategi Pembangunan,* Yogyakarta, Andi Offset, 1995, I hlm 7

ke dalam perubahan masyarakat yang terjadi secara sistemik dan struktural dalam masyarakat itu.[13]

Dewasa ini, konotasi masyarakat pedesaan yang tertutup, tradisional, dan memiliki ciri-ciri pokok tertentu telah mulai ditinggalkan seiring dengan perubahan sosial yang dialami masyarakat desa. Pada tahun 70-an dan awal tahun 80-an terjadi perubahan besar di pedesaan Jawa. Hal tersebut disebabkan oleh penyebaran teknologi baru, dibrelakukannya Revolusi Hijau, mekanisasi pertanian, perbaikan sarana dan prasarana umum secara keseluruhan telah memberikan dampak yang sangat besar bagi struktur ataupun kultur masyarakat desa.

Pembangunan pedesaan yang mulai dijalankan pada tahun 1969 seiring diberlakukannya BIMAS dan Revolusi Hijau banyak berpengaruh pada masyarakat desa terutama dalam sektor ekonomi yang berbasiskan pertanian (Agronomi).[14] Tujuan Revolusi Hijau yang mengutamakan peningkatan produksi pangan, menyebabkan perubahan pola konsumsi dan kesenjangan pendapatan antar petani di pedesaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Revolusi Hijau ini mampu meningkatkan produksi pertanian dua kali lipat padi dan merubah status Indonesia dari pengimpor beras menjadi mandiri (Swasembada Beras) pada tahun 1985. Namun disis lain, revolusi

---

[13] Papang Hidayat, "*Menelusuri Pemahaman Teoritik tentang Perubahan Masyarakat: Rekontruksi Sosiologi atas Teori Perubahan Sosial*", Kumpulan makalah, 2000, hlm 2

[14] Mansour Fakih, *Jalan Lain, Manifesto Intelektual Organik,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar & Insist Press, 2002 hlm 268-295; dan lihat Sediono M.P. Tjondronegoro, *Revolusi Hijau dan Perubahan Sosial di Pedesaaan Jawa,* dalam Prisma Ed.no 02 Th XIX, 1990

ini telah mengakibatkan naiknya tingkat *landlessness* di daerah daerah pedesaan terutama di pulau jawa. Menurut sensus tahun 1963, hanya sekitar 57% keluarga memiliki sawah dan sekitar 50% terjadi pengangguran usia kerja yang mencapai 1,8 juta jiwa pertahun.[15] Dimana hal tersebut menimbulkan urbanisasi pengangguran dan kaum miskin kota.

Di lain pihak, mekanisasi alat-alat pertanian, telah membuat kesempatan kerja semakin berkurang dan meningkatkan jumlah pengangguran pada masyarakat desa. Di Jawa Timur dan Jawa Tengah misalnya, diperkenalkannya mesin penggiling beras telah menghilangkan 7,7 juta penumbuk beras yang kebanyakan dari mereka adalah perempuan atau masyarakat desa yang bertanah sempit.[16]

Perubahan sistem ekonomi dari ekonomi agraris ke ekonomi industri yang di jalankan ke desa-desa di wilayah Jawa, membuat areal pertanian sebagai faktor produksi semakin terbatas. Sehingga melahirkan banyak petani gurem yakni para petani yang memiliki areal tanah yang sangat sedikit.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bambang Ismawan menyebutkan masalah krusial yang dialami desa pasca diberlakukannya Revolusi Hijau yaitu 1) pendapatan masyarakat desa yang rendah, 2) kesenjangan status sosial, 3) meningkatnya jumlah

[15] Mansour Fakih, *ibid*, hlm 282
[16] Sediono M.P. Tjondronegoro, *Revolusi Hijau dan Perubahan Sosial di Pedesaaan Jawa*, dalam Prisma Ed.no 02 Th XIX, 1990

pengangguran angkatan kerja, 4) partisipasi masyarakat yang minim dalam usaha pembangunan yang dilakukan pemerintah.[17]

Faktor lain dalam perubahan masyarakat desa menurut Jepta Leibo, adalah migrasi dari desa ke kota yang tanpa sengaja telah mempengaruhi keseimbangan antara desa yang tradisional dengan kota yang moderen.[18] Selain itu, banyak pihak yang melihat sektor desa merupakan sektor yang mendapat perhatian kelompok *metropolis* yang lebih berkuasa mentargetkan surplus yang menyalurkan sumber-sumber utama (tenaga buruh dan modal), dan mempergunakannya untuk memperluas kepentingan usahanya sendiri sehingga menimbulkan dampak buruk terhadap penduduk pedesaan.[19]

Transisi desa kearah perubahan-perubahan baru membawa implikasi bahwa desa perlu mengalami proses pemberdayaan dan pendampingan yang akan menempatkan desa pada jaringan komunikasi dan hubungan sosial serta ekonomi politik dan kultural yang srategis dan jauh melampaui batas-batas desa. Karena dalam usaha mengahadapi perubahan sosial yang menyertai proses komersialisasi, industrialisasi masyarakat desa mengalami berbagai adaptasi dan transformasi budaya, teknologi dan informasi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Untuk konteks ke-*Garut*-an, perkembangan desa telah mengalami perubahan-perubahan sebagaimana desa-desa lainnya di Indonesia. Hal

---

[17] Bambang Ismawan, "*Masalah Ketenagakerjaan di Pedesaan*", dalam Peter Hagul (ed), *Pembangunan Desa dan LSM*, Jakarta, Rajawali Press, 1992, hlm 4

[18] Jepta Leibo, *Sosiologi Pedesaan Mencari Suatu Strategi Pembangunan*, Yogyakarta, Andi Offset, 1995, hal 175

[19] Norman Long, *Sosiologi Pembangunan Pedesaan*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm 3

disebabkan proses komersialisasi, dan industialisasi serta kemajuan teknologi dan komunikasi yang menyentuh masyarakat desa.

Desa Cidatar merupakan desa yang tidak terlepas dari pengaruh modernisasi dan pengaruh dari luar yang telah menimbulkan perubahan-perubahan sosial baik dari sisi struktur ataupun kultur masyarakatnya.

3) Pembangunan Ekonomi dan Tingkat Pendidikan di Pedesaan

Pada mulanya, upaya pembangunan negara sedang berkembang di indentikan dengan upaya mengingkatkan pendapatan per kapita, dengan keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi secara linear akan menetes ke seluruh sektor dan lapisan masyarakat pedesaan. Arah pembangunan seperti ini banyak dianut oleh negara-negara berkembang dalam upaya peningkatan laju perekonomian negara.

Di Indonesia tingkat kemajuan ekonomi diiringi dengan persoalan-persoalan pembangunan seperti meningkatnya jumlah pengangguran di pedesaan, urbanisasi yang besar-besaran, dan menurunnya sumberdaya manusia dikarenakan menurunnya tingkat pendidikan masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat desa yang menduduki sektor-sektor informal dalam perekonomian.

Banyak bukti yang dapat dilihat, betapa program-program pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini dan telah menghabiskan biaya relatif besar, namun kemudian kurang dapat bermanfaat secara optimal. Hal ini antara lain terjadi karena program-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

program tersebut sebenarnya kurang dibutuhkan oleh masyarakat dan masyarakat dianggap tidak mampu untuk mengurus hal-hal yang demikian. Ketidakmampuan itu tidak lain sebenarnya adalah karena kesalahan kita dalam menempatkan masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat ditempatkan pada posisi yang lemah yaitu sebagai objek pembangunan dan tidak dikembangkan dayanya agar menjadi kreatif sehingga mereka harus menerima keputusan yang sudah diambil.

Pada tahun 1985, data pusat Biro Statistik mencatat bahwa dari 50,8% dari rumahtangga di Indonesia, 35,9%nya berada dalam tingkat kesejahteraan yang rendah. Ketidakmerataan tingkat kesejahteraan memberikan indikasi bahwa manfaat hasil-hasil pembangunan yang diterima masyarakat pedesaan lebih tidak memadai dibandingkan masyarakat kota.[20]

Pasca krisis moneter dewasa ini pertumbuhan ekonomi indonesia hanya empat persen. Pertumbuhan yang sangat rendah ini tidak mampu menyerap tenaga kerja lama dan menganggur maupun tambahan tenaga kerja lebih dari 2 juta per tahun. Hal ini semakin membuat peningkatan sumberdaya masyarakat desa semakin parah terutama yang selama ini berada dalam tingkat kesejahteraan rendah. Hal ini berpengaruh pada peningkatan produktivitas anggota rumah tangga antara lain dalam hal peningkatan pendidikan.

Data Biro Statistik pada tahun 1989, menyebutkan bahwa hampir

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[20]Gunawan Sumodiningrat dan mudrajat Kuncoro, *Strategi Pembangunan Pertanian dan Industri, Mencari simbiosis,* PRISMA edisi No 2 tahun XIX 1990, hal 54

9.785.000, masyarakat desa memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya dikarenakan persoalan biaya. Hal ini bida disebabkan oleh mahalnya biaya pendidikan atau karena rendahnya tingkat pendapatan masyarakat.[21]

Padahal rendahnya pendidikan berhubungan dengan rendahnya kemampuan faktor produksi keahlian. Rendahnya keahlian bertalian dengan rendahanya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan kemudian tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

4) Tinjauan Umum tentang LSM

Di Indonesia, konsep pemberdayaan mulai diterapkan sekitar tahun 1970-an seiring menjamurnya lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang merupakan lembaga Non-pemerintah dan lahir atas inisiatif masyarakat untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat bawah dan memberdayakannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Di Indonesia, LSM pertama kali di usulkan oleh DR Sarino Mangun Pranoto pada pertemuan antar organisasi Non-pemerintah yang bergerak dalam bidang pembangunan desa tahun 1978 di Ungaran. Dia mengusulkan nama LPSM (Lembaga Pembina Swadaya Masyarakat) yang belakangan berubah menjadi LSM.

---

[21] *ibid*, hlm 55

LSM bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ditingkat *grassroot*, yang biasanya dilakukan melalui penciptaan dan dukungan terhadap kelompok-kelompok swadaya lokal, diantaranya;(1) mengidentifikasi kebutuhan kelompok lokal dan taktik-taktik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, (2) melakukan usaha aktif untuk memenuhi kebutuhan-kebutuahn tersebut, (3) menghasilkan dan memobilisasi sumberdaya lokal untuk kegiatan pembangunan pedesaan[22]

Selain itu menurut Sartono Kartodirdjo, fungsi LSM dalam masyarakat adalah sebagai mediator untuk meningkatkan taraf hidup, pengetahuan dan kesadarannya akan segala keterampilan dan potensi-potensi lainnya, membudayakan sikap yang sesuai dengan teknologi, hubungan sosial dan nilai-nilai baru.[23]

Karenannya keberadaan LSM sebagai adalah lembaga alternatif dan inovatif berusaha menggerakan swadaya masyarakat bawah dengan partisipasi dan pemberdayaan yang prosesnya, adalah menumbuhkembangkan sikap kemandirian untuk mampu mengenali dan menggali berbagai potensi yang ada pada masyarakat itu sendiri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pada masa otonomi daerah keberadaan LSM juga sering dikaitkan sebagai lembaga pendamping sekaligus mediasi antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

---

[22] Peter Hennam, "*Pengembangan Bentuk Pembangunan Alternatif: pengalaman LSM diIndonesia*", PRISMA No 4 Tahun XVII 1988 hlm 4

[23] Sartono Kartodirdjo, *Lembaga Swadaya Masyarakat; Sebuah Tinjauan Singkat*, dalam PRISMA ed.No. 01.th XVII 1988, hlm 98

yang dilaksanakan pemerintah. Kelompok mediasi ini berperan melapangkan jalan kearah otonomi daerah, memotivasi terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan mensosialisasikan dan mendorong terselenggaranya tata pemerintahan yang baik.

LePMI dalam mengembangkan masyarakat diharapkan pada ujungnya dapat memberdayakan masyarakat (*empowering society*). Hal ini dikarenakan pengembangan masyarakat umumnya lebih terfokus pada target perubahan kuantitatif dengan tersedianya sarana fisik dan perbaikan tingkat kehidupan materiil sebagai modal awal menuju perubahan kualitatif yakni masyarakat yang terberdayakan dalam cara berfikir, bersikap, dan mengambil tindakan lebih mandiri, berorientasi jangka panjang, makro dan subtansiil. Konsep pemberdayaan yang seperti ini berangkat dari pembangunan ide yang menempatkan manusia sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri. Pola dasar gerakan pemberdayaan ini merujuk kepada perlunya *power* dan menekankan keberpihakan kepada *the powerless*..

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5) Pemberdayaan masyarakat desa

Banyak kosep-konsep pembangunan di negara-negara berkembang menemui kegagalan karena memisahkan pembangunan sosial dari pembangunan ekonomi. Sektor-sektor yang selama ini di kelompokan dalam bidang sosial seperti pendidikan, kesehatan, terabaikan oleh pembangunan sektor ekonomi yang mementingkan aspek fisik saja. Padahal, keberhasilan

negara-negara industri maju (Dunia ke-Satu), terwujud justru karena penekanan yang diberikan pada bidang pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selama ini, pemberdayaan merupakan *the missing ingredient* dalam pembangunan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yang aktif dan kreatif. Karenannya konsep pemberdayaan, munculnya sebagai reaksi terhadap alam pikiran, tata-masyarakat dan tata-budaya sebelumnya yang berkembang di suatu negara. Konsep ini mulai tampak kepermukaan sekitar dekade 1970-an dan terus berkembang hingga akhir abad ke 20-an.[24] Wacana ini muncul bersamaan dengan aliran-aliran eksistensialisme pada masa post-modernisme.[25]

Pemberdayaan ialah menggerakan partisipasi dan etos swadaya masyarakat agar dapat menggunakan kemampuannya untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Al-Qur`an surat Arrad ayat 11;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri"[26]

---

[24] Harry Hikmat *Strategi Pemberdayaan Masyrakat Desa,* Bandung, Humaniora press, 2001, hlm 1

[25] Aliran ini menitik beratkan pada sikap dan pendapat yang berorientasi pada jargon-jargon antisistem, anti struktur dan anti determinisme yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan, lihat Harry Hikmat, *Ibid,* 2001, hlm 1

[26] Q.S: Ar ra`d (13): 11

Pemberdayaan menurut Vidhayandika Moeljatro adalah, kemampuan masyarakat untuk mewujudkan dan mempengaruhi arah serta pelaksanaan atas program, ditentukan dengan mengandalkan daya *(power)* yang dimilikinya sehingga pemberdayaan *(empowerment)* merupakan *central theme* atau jiwa partisipasi yang sifatnya aktif dan kreatif.[27]

Sementara menurut Rapport, pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap sosial, kekuatan politik, dan hak-haknya menurut undang-undang.[28] Secara sederhana, konsep pemberdayaan dalam pembangunan masyarakat selalu di hubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan yang ada dasarnya, pemberdayaan diletakan pada kekuatan tingkat individu dan sosial.

Sedangkan menurut Ginanjar Kartasasmita, memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.[29] Karenanya harus dimulai dengan menciptakan iklim yang bisa menunjang proses pemberdayaan dengan mengenali daya yang dimiliki masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[27] Vidhyandika Moeljatro, "*Pemberdayaan Kelompok Miskin Melalui IDT*", dalam Onny S.Prijini dan AMW. Pranakan (penyunting), *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi* Center For Strategik and International Studies,2000, hlm 4

[28] Harry Hikmat, *Stategi Pemberdayaan masyarakat*, Bandung, humaniora press, 2001, hlm 3

[29] Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, 1996, hlm 144

Pemberdayaan bukan hanya merupakan penguatan individu tetapi juga proses pematahan atau *Breakdown* dari hubungan atau relasi antar subyek dan obyek, yang telah menjadi *mainstream* pengembangan daerah. Proses ini mementingkan adanya pengakuan subyek atas kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki obyek.

Sedangkan menurut Chambers, Konsep ini dikembangkan sebagai *alternatif development* yang bersifat *people centered, partisipatory, empowering,* dan *sustainable*. Konsep ini, merupakan konsep pembangunan yang didalamnya merangkum nilai-nilai sosial, yang secara lebih luas, menurut Friedmann menghendaki *inclusive democracy, appropiate, economic growth, gender equality and intergenerational equity.*[30]

Secara garis besar proses ini bisa berarti pemberian kebebasan serta pengakuan dari subyek ke obyek, dengan memberinya kesempatan untuk meningkatkan hidupnya dengan memakai sumber yang ada, merupakan salah satu manifestasi dari mengalirnya daya tersebut. Karena hasil akhir dari proses kerja LSM dalam hal pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula obyek menjadi subyek (yang baru).[31] Sehingga ketika perubahan menyentuh kehidupan sosial masyarakat, baik dalam bidang struktur, kultur, teknologi, maupun cara berinteraksi, masyarakat yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[30] Gianjar Kartasasmita, *ibid,* 1996, hlm 142

[31] Vidhyandika Moeljarto, *ibid,* 2000, hlm 135

didampingi sudah siap untuk melakukan antisipasi terhadap berbagai implikasi yang mungkin akan terjadi.

G. Metode Penelitian

1. Penentuan subyek dan obyek penelitian

Adapun subyek penelitian dalam skripsi ini adalah; staf pengurus harian LePMI, yang meliputi ketua, sekertaris dan setiap ketua divisi, serta jamaah Mesjid sebagai mitra dalam proses pelaksanaan pemberdayaan yang dilaksanakan LePMI di desa Cidatar.

Sedangkan obyek penelitian ini adalah proses pemberdayaan yang terfokus pada aspek pendidikan dan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan LePMI dengan basis jamaah mesjid.

2. Metode pengumpulan data

a. Wawancara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data ditujukan kepada infoman yang terpilih. Informan ini dipilih dengan mempertimbangkan relevansi kewenangan dan kemampuan yang dikembangkan terutama dengan orang yang memiliki pengetahuan dan sikap yang relevan dengan tujuan penelitian.[32]

---

[32] Masri Singarimbun, *Metode Penelitian survai*, Jakarta, LP3ES 1982 cet ke II, hlm 145

Informan tersebut yaitu; pertama, staf harian LePMI yang meliputi ketua umum, sekertaris, dan tiap-tiap ketua bidang. Sedangkan informan kedua yaitu masyarakat dampingan yakni masayarakat desa Cidatar terutama orang-orang yang dipilih LePMI sebagai tokoh yang dilibatkan dalam setiap pogram-program LePMI dilapangan.

Bentuk wawancara yang dilakukan adalah meliputi wawancara bebas terpimpin yakni prosedur wawancara yang mengikuti pedoman seperlunya. Pedoman wawancara hanya berbentuk butir-butir masalah dan sub masalah yang diteliti dan selanjutnya dikembangkan sendiri oleh pewawancara.[33]

Wawancara ini dilakukan baik secara perorangan atau kelompok dan dimaksudkan untuk memepelajari kejadian dan kegiatan yang tidak dapat diamati secara langsung.

b. Pengamatan

Metode pengamatan sering dikenal dengan istilah observasi. Yakni kegiatan yang meliputi pemuatan perhatian terhadap suatu objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi mengobeservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.[34]

Metode observasi yang akan dipakai adalah menggunakan tehnik pengamatan terbuka, dimana observasi ini diketahui oleh subjek peneliti,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[33] Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach edisi I*, Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM,1987 hlm 206

sedangkan para subjek dengan sukarela memberikan kesempatan kepada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi, dan mereka menyadari bahwa ada orang yang mengamati hal yang dilakukan mereka.[35]

c. Dokumentasi

Metode dokumetasi adalah tehnik pengumpulan data dengan cara diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada pada benda-benda tertulis, seperti buku-buku, peraturan-peraturan lembaga, AD/ART, catatan-catatan harian dan sebagainya.[36]

3. Jenis data

a. Data primer

Yaitu data yang langsung di peroleh dari LePMI yang meliputi sejarah berdirinya LePMI, Visi dan Misi LePMI, struktur kepengurusan serta program kerja LePMI di masyarakat. Sedangkan data tentang masyarakat Cidatar akan diperoleh dari wawancara dengan pemerintah desa yang meliputi letak geografis desa, keadaan ekonomi dan sosial masyarakat.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data penunjang bagi penulisan skripsi, yang akan diperoleh dari buku-buku, makalah-makalah, artikel dan tulisan-tulisan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[34] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* 2002, hlm 146-147
[35] Lexy J Moleong, *ibid,* 2002, hlm 127
[36] Lexy J Moleong, *ibid,* 2002, hlm 149

lain yang membahas tentang wacana wacana pemberdayaan masyarakat pedesaan.

4. Metode analisis data

Analisa merupakan upaya mencari tata hubungan secara sistematik antara hasil catatan dilapangan, hasil wawancara dan bahan lain untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena program pemberdayaan yang dilakukan LePMI.

Analisis akan dilaksanakan setelah data selesai dikumpulkan. Data tersebut akan diolah untuk mendapatkan kebenaran-kebenaran dari persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian, melalui kaidah-kaidah penelitian kualitatif, seperti data akan dibuat dalam berbagai kategori baik level kelompok masyarakat, struktur sosial masyarakat, data organisasi, sistem yang berlaku dalam organisasi, dan struktur organisasi. Data yang telah dikategorisasi akan dirujuk kembali kepada informan maupun responden untuk *cros-chek* akhir, kemudian didiskusikan dengan pembimbing sebelum akhirnya disimpulkan secara kontekstual.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian dalam bab-bab terdahulu, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 telah memberikan dampak yang sangat krusial bagi perekonomian desa Cidatar akan tetapi yang paling menonjol yakni sektor pertanian yang menurut data tahun 2000-2003 mengalami penurunan hampir 36 %. Hal ini disebabkan beberapa faktor penting diantaranya kebijakan harga gabah yang tidak menentu, kenaikan alat-alat pertanian, melonjaknya harga pupuk dan obat-obat tanaman.

2. Meningkatnya jumlah pengangguran usia kerja yang hampir mencapai angka 46 %, akibat tingginya angka putus sekolah dan kurang handalnya sumberdaya manusia yang mempunyai keterampilan (*life skill*). Juga Banyaknya generasi yang berprestasi dan sangat potensial, akan tetapi tidak dapat melanjutkan pendidikan dikarenakan mahalnya biaya pendidikan dan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dikarenakan sektor pertanian sebagai basis utama perekonomian mengalami penurunan.

3. Pemberdayaan yang dilaksanakan LePMI menyangkut tiga bidang yakni, bidang ekonomi, bidang pendidikan dan bidang sosial kemasyarakatan. Dalam bidang ekonomi, LePMI mendirikan sebuah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

usaha yang dilaksanakan bersama masyarakat desa Cidatar. Pemberdayaan dalam bidang ini dimulai dengan beberapa proses yakni, mengajak beberapa tokoh masyarakat untuk berdiskusi tentang problem dan kecenderungan masyarakat dan sebagian jamaa`ah Masjid, kedua, sosialisasi dan penyamaan persepsi dengan para tokoh masyarakat desa Cidatar tentang lembaga usaha yang akan dibentuk, ketiga launching dengan mengundang masyarakat desa Cidatar dan melelang saham bagi masyarakat yang ingin menanamkan sahamnya dalam usaha ini.

4. Untuk memudahkan kerja-kerja dilapangan maka LePMI membentuk kelompok-kelompok binaan yang kelak akan menerima program-program LePMI. Kelompok-kelompok ini didasarkan pada kelompok jama`ah Masjid.

5. Dalam hal pendidikan LePMI memberikan beasiswa Intelektual Qur`an sebagai upaya mendorong para siswa-siswi di kabupaten Garut dalam upaya peningkatan sumber daya manusia. Hal ini dilakukan LePMI dan bekerjasama dengan sekolah-sekolah dikabupaten Garut.

6. Program ini dilaksanakan melalui dua pembinaan rutin yakni; Pembinaan terprogram setiap satu bulan sekali dengan materi yang ditetapkan dan disesuaikan dengan tingkat sekolah. Pembinaan ini biasanya berupa kuliah umum dengan materi-materi yang berhubungan dengan pemahaman terhadap al-Qur`an seperti, tafsir Qur`an, dan tahfiz Qur`an. Kedua yaitu pembinaan persemester yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dilakukan pada saat liburan sekolah. Dimana para siswa diharuskan mengikuti beberapa seri kuliah tentang ke-al-Qur`an-an selama tiga hari tiga malam.

B. SARAN-SARAN

1. Pemberdayaan adalah sebuah usaha yang memerlukan waktu yang tidak sebentar akan tetapi selayaknya dilaksanakan secara menyeluruh dari dalam lembaga sendiri. Karena sebagaimana *Cook dan Macaulay* menyebutkan bahwa kunci keberhasilan pemberdayaan adalah adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk memulai pemberdayaan pada diri kita sendiri
2. Dalam pelaksanaan program LePMI dilapangan hendaknya ada target keberhasilan yang ingin dicapai untuk memudahkan evaluasi kerja.

C. KATA PENUTUP

Alhamdullilah, syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Ilahi Rabi, atas segala kemudahan dan petunjuk hingga akhirnya skripsi ini bisa tersusun. Penulis sadar bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, dan penulis berharap akan banyak masukan membangun, dan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Edi S Ekadjati dkk, *Masyarakat Sunda dan Kebudayaan Sunda,* Jakarta, Girimukti Pusaka, 1984

Fahmi Justiwi, *Desa dan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa,* Kumpulan Esai Ilmu Sosial Dasar, 1986

Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan,* Jakarta, CIDESINDO,1996

Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat,* Humonia Press, Bandung, 2001

Jefta Leibo, *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta, Andi Offset, 1995

Jim Lfe, *Community Development*, Longman Australia, 1995

Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta, Lembaga Penerbitan FE-UI, 1993

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990

----------, *Pokok-Pokok Antropologi* Sosial, Jakarta, Dian Rakyat, 1992

Lexy J Moleong, *Metodologi, Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung, Remaja Rosda Karya, 2002

Mansour Fakih, *Jalan Lain—Manifesto Intelektual Organik--,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar& Insist Press, 2002

Masri Singarimbun, *Metode Penelitian survai*, Jakarta LP3ES 1982 cet ke II

MT Felik Sitorus, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bogor, IPB Press, 1998

Mubriyanto, *Strategi Pembangunan Masyarakat Desa di Indonesia,* Yogyakarta, 1996

Norman Long (Pentj), *Sosiologi Pembangunan Pedesaan*, Jakarta, Bina Aksara, 1987

Peter Hagul (edt), *Pembangunan Desa dan LSM (kumpulan esai),* Jakarta, Rajawali Press, 1992

Robert Chambers (terj), *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang,* Jakarta LP3S, 1987

Robert W Hefner (terj), *Geger Tengger Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik,* Yogyakarta, LkiS, 1999

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sajogyo, *Sosiologi Pedesaan—Analisa Pedesaan Atas Perkembangan Masyarakat Pedesaan di Indonesia*— Bandung, Buku Pegangan Fakultas Peternakan Unpad, 1978

----------, *Sosiologi Pedesaan, jilid ke dua,* 1997

Sartono Kartodirdjo, *Masyarakat Kuno dan Kelompok-Kelompok Sosial,* Jakarta, Bhatara Karya Aksara, 1997

Soedjito Sastrodohardjo, *aspek Sosial Budaya Dalam Pembangunan Pedesaan,* Yogyakarta, Tiara Wacana 1987

Suharni dkk, *Pesta Demokrasi di Pedesaan,* Yogyakarta, P3PK UGM, 1992

Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach I,* Yogyakarta Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM,1987

Taliziduhu Ndaraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa,* Jakarta, Bumi Aksara

Vidhyandika Moeljarto, *Pemberdayaan Masyarakat melalui IDT,* Jakarta, Center For Strategik and International Studies, 2000

Makalah

Arbi Sanit *"Mewadahi Partisipasi Politik Masyarakat"* Kumpulan makalah dalam forum CIDES, Jakarta, 1996

Kutut Suwondo, *Demokratisasi Di Pedesaan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Lokal (Suatu kajian sosial-politik),* Di sampaikan pada Forum "Seminar Sehari Tentang Otonomi Pemerintahan Desa" di Unggran yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Semarang pada tanggal 28 Februari 2000

Mochtar Naim, *Nagari Versus Desa: Sebuah Keracunan Struktural*, di sampaikan pada Seminar Sehari Pekan Budaya dan Pameran Pembangunan Sumatra Barat, di Payakumbuh, 25 Desember 1989.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Papang Hidayat, *Menelusuri Pemahaman Teoritik tentang Perubahan Masyarakat: Rekontruksi Sosiologi atas Teori Perubahan Sosial*, Kumpulan makalah, 2000

Pipin Muttaqien, *Pemberdayaan ekonomi Masyarakat (studi Analisis gagasan dan usaha LePMI)*, disampaikan dalam persentasi pemilihan pemuda pelopor se-kabupaten Garut, 2002

Pratikno, *Kelembagaan Politik Desa*, disampaikan pada Pertemuan Forum FPPM ke 4 "Demokratisasi Masyarakat Desa", Tenggarong 19-22 Juni 2001.

Sayogyo, *Dari "punya daya" Menjurus ke Partisipasi yang Saling Memberdayakan*, Pemaparan Pembuka, Forum V (FPPM) di Bukittinggi, tanggal 3-6 Juni 2002

Tantan Hermansah, *LePMI dalam Setting Perjalanan Cita-cita yang Terhenti:Sebuah Refleksi*, makalah yang dibuat khusus Untuk kepentingan penulisan skripsi.

Artikel

David C Korten, *LSM Generasi Keempat: Fasilitator Gerakan Kemasyarakatan*, dalam PRISMA edisi No 4 Tahun XVII 1988

Loekman Soetrisno, *Negara dan Peranannya dalam Menciptakan Pembangunan desa yang mandiri*, dalam PRISMA No 1 Tahun XVII 1988

Philip Eldridge, *LSM dan Negara*, dalam PRISMA No 7 Tahun XVIII,1989

Sartono Kartodirjo, *Lembaga Swadaya Masyarakat--Tinjauan Singkat--*, dalam PRISMA No 1 Tahun XVII 1988

Sayogyo, *Pemikiran tentang Kemiskinan di Indonesia--dari masa penjajahan sampai masa pembangunan--*, dalam PRISMA edisi No.3 Tahun XII,1993

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA